

ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dwi Susilowati

dwi_s@unisma.ac.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan LP2KD tahun 2018 di Kabupaten Mojokerto adalah: 1) Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2018; 2) Mendeskripsikan kendala, permasalahan, dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Analisis Deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil Penelitian ini antara lain: Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen pada tahun 2017 menjadi 10,08 persen di tahun 2018, atau turun sekitar 0,11 persen. Penurunan persentase penduduk miskin (P0) tidak diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2), artinya persentase penduduk miskin turun, tetapi jumlah penduduk miskin yang saat ini ada memiliki kesenjangan kemiskinan yang semakin jauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar.

Kata kunci : Kemiskinan, Ketimpangan, Penduduk.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan (poverty) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penang-gulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka kebijakan pem-bangunan di Indonesia baik pusat maupun daerah diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Bentuk komit-men Pemerintah terhadap

pengentasan penduduk miskin, program penang-gulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit berarti penang-gulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kese-jahteraan lahir dan batin.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penang-gulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggu-angan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Tugas TKPK Kabupaten sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Laporan tersebut dapat digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Mojokerto yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan LP2KD tahun 2018 di Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2018;

2. Mendeskripsikan kendala, permasalahan, dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Daerah

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan melihat potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain dapat diukur dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan perkapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, perluasan lapangan dan kesempatan kerja, serta perkembangan laju inflasi.

Potensi Unggulan Daerah

Selain dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah karena terdapat tempat peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yaitu di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto menyimpan banyak potensi unggulan yang menjanjikan peluang besar bagi masyarakat sekitar.

Potensi unggulan daerah yang berkembang di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

a. Sektor industri.

Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri besar dan kecil/industri rumah tangga/kerajinan di Kabupaten Mojokerto telah membentuk kawasan tersendiri, antara lain:

- Industri besar: Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis);
- Kecil/industri rumah tangga: Alas Kaki (Kecamatan Sooko, Trowulan dan Puri), Patung Batu (Kecamatan Trowulan), Cor Kuningan (Industri Kecamatan Trowulan), Gerabah (Kecamatan Puri), Kripik kedelai, ubijalar, ubikayu (kec. Gondang, Pacet).

Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Kabupaten Mojokerto.

b. Sektor pariwisata.

Kawasan paling strategis di Kabupaten Mojokerto adalah kawasan wisata. Banyaknya peninggalan sejarah kerajaan Mojopahit di Trowulan serta wisata alam dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas.

- Seni Budaya: Grebeg Suro Mojopahit, Grebeg dan Haul Syeh Jumadil Kubro, Kesenian Bantengan, Tari Klasik, Mocopat, Karawitan.
- Wisata Alam: Pemandian Ubalan Pacet, Padusan Air Panas, Air Terjun Coban Canggung, Air Terjun Dlundung, Taman Hutan Rakyat R. Soeryo, Watu Blorok.
- Wisata Religi/Agama: Troloyo, Makam Syeh Jumadil Kubro, Makam Vihara, Makam Tirim, Makam Mendhek, Makam Krapyak.

- Wisata Budaya/Peninggalan Majapahit: Petirtaan Jolotundo, Candi Bangkal, Candi Bajangratu, Candi Brahu, Candi Genting, Candi Wringinlawang, Candi Gentong, Candi Minakjinggo, Candi Jedong, Candi Kedaton, Candi Sumur Gantung, Candi Grinting, Candi Tikus, Candi Kasimantengah, Candi Siti Hinggil, Kolam Segaran.

Kawasan ini perlu didukung dengan penataan kios-kios suvenir, Pusat Informasi Pariwisata (PIP), penyediaan lokasi parkir dan pasar cinderamata yang mendukung obyek wisata sehingga akan men-jadikan Kabupaten Mojokerto menjadi semakin menarik untuk dikunjungi.

c. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.

Di sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ada dua komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional Propinsi dan Nasional yaitu:

- Komoditi buah-buahan (mangga, alpukat, pisang, durian, sirsak, dll);
- Komoditi perkebunan (tebu, tembakau, mete, kayu putih dll), Padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, cabe rawit.

Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sebesar 5,74 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,49 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,49 persen. Diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,67 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,55 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,18 persen.

Lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan dikisaran 5 persen adalah lapangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,93 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,17 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya sebesar 0,91 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,38 persen. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2018 lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Indikator ekonomi berikutnya yang penting untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan regional yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat.

Kondisi pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2013-2017 semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pendapatan per

kapita tahun 2013 berdasarkan PDRB sebesar 39,33 juta Rupiah pada tahun 2014 sebesar 41,37 juta Rupiah, tahun 2015 sebesar 43,31 juta Rupiah, tahun 2016 sebesar 45,28 juta Rupiah, dan tahun 2017 sebesar 47,47 juta Rupiah. Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang cukup signifikan selama periode tahun 2013-2017 ini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Tingkat Inflasi

Salah satu indikator perekonomian makro adalah angka inflasi di suatu daerah. Selama kurun waktu 2011-2015 inflasi di Kabupaten Mojokerto rata-rata 3,99 persen per tahun. Meskipun masih dalam kategori low inflation atau disebut juga inflasi satu digit, stabilitas perekonomian di Kabupaten Mojokerto sudah cukup bagus dengan rata-rata angka inflasinya tidak jauh dari 10 persen.

Selama kurun waktu 2013-2017 perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Mojokerto memiliki kecenderungan yang menurun. Dari perkembangan tingkat inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga yang terjadi pada tahun 2017 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan inflasi yang semakin menurun (membaik) secara tidak langsung akan memberi dampak bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Kondisi Kemiskinan Dalam Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi adalah dengan melihat capaian dan perkembangan garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

a. Garis Kemiskinan

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2014-2018) adalah sebagaimana digambarkan melalui grafik pada gambar 7. Pada grafik tersebut nampak bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu Tahun 2014-2018 terus meningkat. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto naik sekitar Rp. 77.001, yaitu dari Rp. 293.609 per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi Rp. 370.610 per kapita per bulan pada tahun 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada periode 2017 sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 64,91 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2016 yang sebesar 59,56 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan yaitu makanan minuman jadi, beras (padi-padian), serta tembakau dan sirih. Diikuti kemudian dengan komoditi ikan, sayur-sayuran, serta telur dan susu. Sedangkan

komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan yaitu biaya perumahan, serta aneka barang dan jasa.

Posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018, termasuk dalam kategori rendah yaitu garis kemiskinan suatu wilayah Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan Provinsi maupun Nasional.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Dengan prosentase kemiskinan sebesar 10,08 persen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebanyak 111.550 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 4.332.590 jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 25.949.800 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hanya memberikan kontribusi sebesar 2,57 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan sebesar 0,43 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 menempati urutan ke 18 (delapan belas) dari yang terendah. Perkembangan Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.

c. Persentase Penduduk Miskin (P0).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar 10,08 persen, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen jika dibandingkan tahun 2017. Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, di mana pada tahun yang sama persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,85 persen sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 9,66 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur meskipun masih sedikit lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional.

Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto (pada tahun 2018) menempati urutan ke 18 (delapan belas) dari terendah.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto selama periode 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif, dengan perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun, dengan rata-rata penurunan angka persentase kemiskinan sebesar 0,12% per-tahun.

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend menurun, mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka menekan angka persentase penduduk miskin dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Selama periode 2014-2018, trend perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun memiliki trend yang relevan, akan

tetapi percepatan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto hanya sekitar 34 persen dari rata-rata percepatan penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan sekitar 36 persen dari rata-rata percepatan penurunan di tingkat Nasional.

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan relevansi antara perkembangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui program dan kegiatan pembangunan telah sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar 1,81 mengalami peningkatan sebesar 0,11 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,95 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 1,71, maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah tingkat kesenjangan di Provinsi meski masih sedikit di atas Nasional.

Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 berada pada posisi ke 27 (dua puluh tujuh) dari terendah.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2014-2018 menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend meningkat.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan trend meningkat, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin memburuk. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan belum dapat berjalan efektif dan belum berdampak positif.

Selama tahun 2014-2018, khususnya tahun terakhir, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang tidak sama (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan tidak relevan antara perkembangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkecil nilai indeks kedalaman kemiskinan melalui program dan kegiatan pembangunan belum sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar 0,48 mengalami peningkatan sebesar 0,02 jika dibandingkan dengan

tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,49 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 0,44, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah tingkat kesenjangan di Provinsi meskipun masih lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional.

Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 berada pada posisi ke 30 (tiga puluh).

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend meningkat.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan trend meningkat, mengindikasikan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin melebar. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin dapat dikatakan belum dapat berjalan efektif dan belum memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Selama tahun 2014-2018, khususnya pada tahun terakhir, perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang tidak sama (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun trend perkembangan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan ketidakrelevansian antara perkembangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional dapat menjadi indikasi bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkecil nilai indeks keparahan kemiskinan melalui program/kegiatan pembangunan belum sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi maupun upaya secara Nasional.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar 4,27 persen, mengalami penurunan sebesar 0,73 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017. Bila melihat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional, dimana pada tahun yang sama persentase TPT di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99 persen dan TPT secara Nasional adalah sebesar 5,34 persen, maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto lebih tinggi (lebih buruk) terhadap Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih baik terhadap capaian Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional. Posisi relatif Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke 30 (tiga puluh) dari terendah.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif,

dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend yang meningkat. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2018 lebih baik (lebih rendah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Hal ini tentu menjadi informasi yang baik bahwa pada tahun 2018 kebijakan maupun program yang telah di-upayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.

Selama periode 2014-2018, trend perkembangan Ting-kat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang hampir sama (relevan) dengan trend perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur mau-pun trend perkembangan secara Nasional.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat di Kabu-paten Mojokerto setidaknya akan membawa dampak/berkontribusi pada kondisi di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

Dari seluruh analisis dalam dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, indi-kator yang masih menjadi masalah adalah pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, karena perkem-bangan capaian kedua indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2014-2018) menunjukkan trend meningkat (memburuk).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya penanggulangan kemiskinan, secara legalitas berupa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto. Dokumen-dokumen tersebut terperinci pada tabel berikut.

Tabel 1.
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

No.	Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	Peraturan Tentang
1.	Instruksi Bupati Mojoekrto nomor 445/2913/416-102.0/2018	Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Mojokerto
2.	Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/642/HK/416-012/2016	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto
3.	Peraturan Bupati Mojokerto nomor 49 tahun 2013	Tata cara penerbitan surat pernyataan miskin
4.	Peraturan Bupati Mojokerto nomor 13 tahun 2011	ketentuan Pelaksanaan penerbitan surat pernyataan miskin kegiatan jaminan kesehatan daerah (jamkesda)
5.	Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/186/HK/416-012/2013	Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di

		Kabupaten Mojokerto
6.	Peraturan daerah nomor 7 tahun 2012	tanggung jawab sosial Perusahaan
7.	Peraturan Bupati Mojokerto nomor 41 tahun 2011	Tata cara Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan
8.	Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010	kesejahteraan lanjut usia
9.	Keputusan bupati mojokerto nomor 188.45/182/HK/416-012/2011	pembentukan tim pengelola penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan, dan bantuan operasional kesehatan
10.	Peraturan Bupati Mojokerto nomor 50 tahun 2017	pedoman operasional penyelenggaraan jaminan persalinan
11.	Surat Keputusan bupati mojokerto 188.45/606/HK/416-012/2016 perubahan atas Keputusan bupati mojokerto 188.45/418/HK/416-012/2016	pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;

- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penang-gulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggu-langan kemiskinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggu-langan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:

- 1) Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
- 2) Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
 - b. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
- 3) Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
 - a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda-yaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda-yaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.

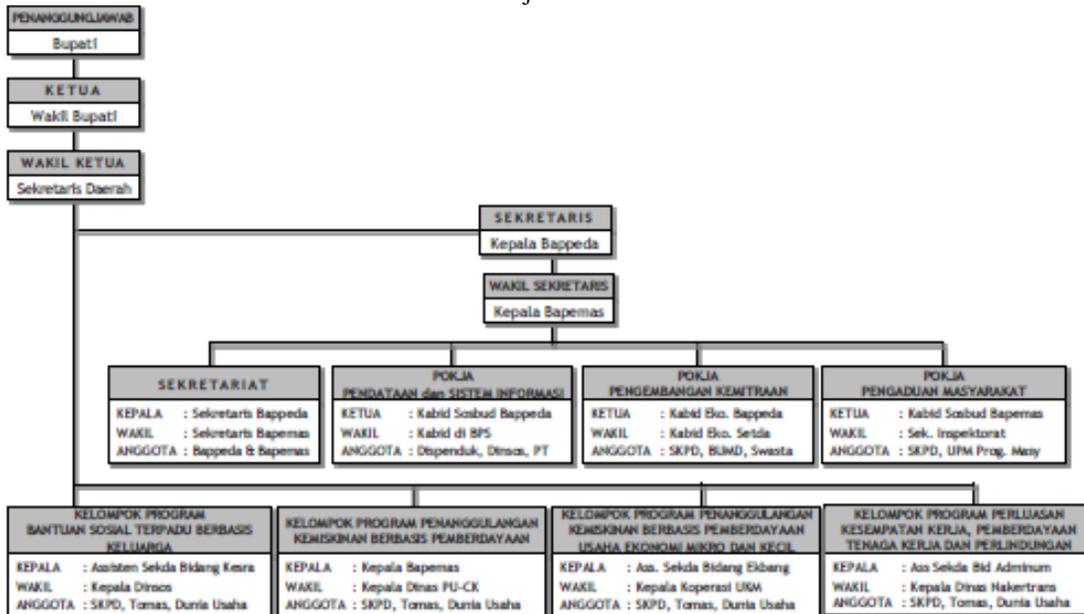
Masing-masing kelompok program bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pembedangannya.

Skema koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dituangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 adalah dengan skema sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)

Gambar 1.

Skema Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Oleh TKPK Kabupaten Mojokerto.



Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Karena tugas TKPKD sebagian besar terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Mojokerto umumnya berupa rapat-rapat koordinasi, yaitu:

- Rapat koordinasi tingkat daerah (Kabupaten Mojokerto dan Propinsi Jawa Timur); dan
- Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Mojokerto juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Mojokerto melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPKD Kabupaten Mojokerto. Selaku penanggungjawab, Bupati Mojokerto berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.

a. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada awal tahun n+1.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat bertempat di Dinas Sosial kabupaten Mojokerto, dimana ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan akan dimasukkan ke dalam data Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya akan diusulkan untuk menerima program bantuan sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kondisi Kemiskinan

- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen pada tahun 2017 menjadi 10,08 persen di tahun 2018, atau turun sekitar 0,11 persen.
- Penurunan persentase penduduk miskin (P0) tidak diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2), artinya persentase penduduk miskin turun, tetapi jumlah penduduk miskin yang saat ini ada memiliki kesenjangan ke-miskinan yang semakin jauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar.
- Dari sisi sektoral, sektor-sektor atau bidang-bidang yang perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah bidang-bidang dengan indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.
Ringkasan Prioritas Masalah

Bidang	Indikator yang perlu mendapat Intervensi	Keterangan	
		Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional	Trend
Ketenagakerjaan	TPT	lebih buruk dari capaian Provinsi, lebih baik dari capaian Nasional	meningkat, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
Pendidikan	APK SD/MI	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	menurun, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
	APK dan APM SMP/MTs	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	meningkat, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
Kesehatan	AKB per 1000 kh	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	meningkat, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
	AKI per 100ribu kh	lebih buruk dari capaian Provinsi, lebih baik dari capaian Nasional	meningkat, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	meningkat, capaian tahun akhir lebih tinggi dari tahun sebelumnya
	Rasio Bidan per 100 ribu penduduk	lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional	menurun, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya

Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)

Bidang	Indikator yang perlu mendapat Intervensi	Keterangan	
		Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional	Trend
Ketahanan Pangan	Harga Beras	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	meningkat, harga tahun akhir lebih tinggi dari tahun sebelumnya
	Harga kebutuhan pokok non beras	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional, kecuali harga jagung dan kedelai	meningkat

2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

- Belum memiliki regulasi yang secara spesifik, jelas dan tegas mencan-tumkan kemiskinan sebagai isu utama;
- Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung mau-pun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
- Belum memanfaatkan analisis untuk menentukan focus dan locus dalam perencanaan program;
- Antar program belum menunjukkan adanya Komplementaris;
- Belum menggunakan database kemiskinan dalam menentukan pe-nerima manfaat program.

3. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojo-kerto telah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto;
- Kinerja TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal:
- Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah;
- Pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai.

Rekomendasi

1. Perlunya memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemis-kinan melalui kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan pe-laksanaannya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya, misalnya:
 - Perda tentang penanggulangan kemiskinan,
 - Peraturan yang mewajibkan Perangkat Daerah yang memiliki program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk meman-faatkan Data terpadu PPFM yang telah di update oleh TKPK/Dinas Sosial.
2. memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola data-data kemis-kinan menjadi informasi yang up to date;

3. mengembangkan sistem manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis data BDT-PPFM;
4. meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster;
5. mengembangkan pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis web;
6. mengembangkan program khusus penanggulangan kemiskinan yang merupakan inovasi daerah, khususnya yang memiliki basis pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
7. membangun keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011, *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2018, *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2018*, Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*, Surabaya.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2018, *Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017*, Mojokerto.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*, Surabaya.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, *Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin*, Jakarta.
- , *Outline, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan – Tahun 2013*, ---
- , <https://www.bps.go.id/>
- , <https://www.jatim.bps.go.id/>
- , <https://www.bdt.tnp2k.go.id/>
- , <https://www.siskaperbapo.com/>